

# Agresi Militer Belanda II Sebagai Upaya Menjaga Kedaulatan RI 1948-1949

Eka Nofri Ari Yanto, Suyanti, Jamin Safi

-  ARTIKEL
-  Sejarah 1
-  Universitas Galuh

---

## Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3122757829

Submission Date

Dec 29, 2024, 9:35 AM UTC

Download Date

Dec 29, 2024, 9:46 AM UTC

File Name

REVISI\_AGRESI\_1\_.docx

File Size

70.5 KB

20 Pages

7,431 Words

48,699 Characters

# 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
  - Quoted Text
- 

## Top Sources

- 26%  Internet sources
  - 0%  Publications
  - 0%  Submitted works (Student Papers)
-

## Top Sources

- 26% Internet sources
- 0% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet		
		adoc.pub	15%
2	Internet		
		eprints.uny.ac.id	5%
3	Internet		
		www.abhiseva.id	1%
4	Internet		
		id.123dok.com	0%
5	Internet		
		etheses.uinsgd.ac.id	0%
6	Internet		
		www.kaskus.co.id	0%
7	Internet		
		online-journal.unja.ac.id	0%
8	Internet		
		repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id	0%
9	Internet		
		repository.usd.ac.id	0%
10	Internet		
		maxvablog.wordpress.com	0%
11	Internet		
		lib.unnes.ac.id	0%

12	Internet	id.scribd.com	0%
13	Internet	www.sayanda.com	0%
14	Internet	demo.jogjalib.com	0%
15	Internet	saripedia.wordpress.com	0%
16	Internet	haripurwati06.blogspot.com	0%
17	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	0%
18	Internet	roboguru.ruangguru.com	0%
19	Internet	shintarizkiwulandari.blogspot.com	0%
20	Internet	sisapeninggalansejarah.blogspot.com	0%
21	Internet	jogjapress.wordpress.com	0%
22	Internet	journal.unnes.ac.id	0%
23	Internet	prilliania.blogspot.co.id	0%
24	Internet	www.tribunnewswiki.com	0%
25	Internet	aloysiusbryan.blogspot.com	0%

26	Internet	cjdwnews.wordpress.com	0%
27	Internet	issuu.com	0%
28	Internet	kbr.id	0%
29	Internet	www.gurupendidikan.co.id	0%
30	Internet	www.scribd.com	0%
31	Internet	www.slideshare.net	0%
32	Internet	selokartojaya.blogspot.com	0%
33	Internet	id.wikipedia.org	0%

## AGRESI MILITER BELANDA II SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEDAULATAN RI 1948-1949

Eka Nofri Ari Yanto<sup>1</sup>, Suyanti<sup>2</sup> Jamin Safi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas PGRI Madiun, Indonesia

<sup>3</sup> Institut Sains dan Kependidikan Kie Raha Maluku Utara, Indonesia

E-mail: [eknofri@unipma.ac.id](mailto:eknofri@unipma.ac.id), [yantiee.nathan@gmail.com](mailto:yantiee.nathan@gmail.com), [jaminsafii@gmail.com](mailto:jaminsafii@gmail.com)

### Abstrak

Setelah agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, pemerintah Indonesia lumpuh dan para pemimpinnya ditawan. Akibatnya, eksistensi Indonesia mengalami masa kritis. Pada masa inilah Sri Sultan Hamengku Buwono IX melawan Belanda dengan mendukung para gerilyawan. Penelitian ini mendeskripsikan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda II. Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah. Pertama, penulis melakukan pengumpulan sumber dengan membaca literatur-literatur yang relevan dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Selanjutnya, penulis melakukan kritik sumber, yang meliputi penelaahan terhadap sumber internal dan eksternal. Selanjutnya, tahap interpretasi yaitu menafsirkan bahan-bahan yang telah diperoleh dengan cara analitis atau sintesis. Tahap ini menyajikan hasil interpretasi secara kronologis dan deskriptif dalam bentuk karya sejarah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX bergabung dengan Republik Indonesia melalui Maklumat 5 September 1945 yang menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa Republik Indonesia ketika Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama Agresi Militer Belanda II, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendukung penuh perjuangan gerilya melawan Belanda. Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memprakarsai serangan besar yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini ternyata mampu menekan Belanda dalam pertempuran dan diplomasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut Belanda untuk mengembalikan ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta, membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditawan, dan melanjutkan perundingan perdamaian yang pada akhirnya menghasilkan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat kepada Belanda.

### PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah Indonesia juga dipengaruhi oleh berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Indonesia diambil alih oleh Jepang setelah kurang lebih 3,5 tahun (1942-1945). Pasukan Jepang mulai mundur dari Indonesia dengan perlahan. Pasukan Sekutu, dipimpin oleh Jenderal Christison, kemudian tiba di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945. Tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan senjata tentara Jepang.

NICA, atau Administrasi Kerajaan Netherland Indies, berusaha mengembalikan kekuasaan di Indonesia, tampaknya mengantisipasi kedatangan Sekutu. Proklamasi Soekarno tidak dianggap

oleh Belanda sebagai pengumuman kemerdekaan. Belanda ingin mengambil alih Indonesia, yang memiliki banyak sumber daya alam.

2 Selain itu, orang Indonesia dan Belanda bertikai. Pada bulan Oktober, November, dan Desember 1945, Jakarta menjadi tempat teror dan kekerasan sampai-sampai penduduknya menutup pintu pada waktu senja (Mochtar, 1982). Ribuan orang mati dalam kekejaman yang dilakukan oleh Sekutu dan NICA di seluruh dunia.

23 Sebuah rapat kabinet pada 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Yogyakarta adalah sebuah kesultanan yang berasal dari Kerajaan Mataram Islam sebelum menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua bagian: Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menurut Perjanjian Giyanti.

2 2 Kamis tanggal 29 Jumadil Awal 1680 tahun Jawa, atau 13 Maret 1755, Pangeran Mangkubumi mengumumkan berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini terjadi satu bulan setelah perjanjian Giyanti, yang dibuat pada 29 Rabiul Akhir 1680 tahun Jawa, atau 13 Februari 1755. Pada tahun yang sama, Pangeran Mangkubumi diberi gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang menjadikan hari lahir Kesultanan Yogyakarta sebagai ibu kotanya.

21 Yogyakarta harus menjadi tempat awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yogyakarta memiliki sejarah yang luar biasa karena menjadi ibu kota Indonesia pada tahun 1946. Ini tentu saja tidak terlepas dari peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang dalam tulisan ini disebut sebagai "Sri Sultan". Tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan di Jakarta, Sri Sultan menyambutnya bersama Paku Alam VIII dan menyatakan bahwa Yogyakarta akan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pernyataan ini sangat disukai oleh Soekarno. Selain itu, keduanya mulai menjalin hubungan. Karena Sri Sultan benar-benar tidak mengharapkan apa pun selain Indonesia merdeka dan Republik Indonesia bertahan, sangat mudah untuk memahami hubungan baiknya dengan Republik Indonesia. (Kutoyo, 1996)

2 2 Sebelum menjadi raja, Sri Sultan dikenal sebagai Gusti Raden Mas Dorodjatun. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912, dan naik tahta setelah ayahnya meninggal pada tanggal 18 Maret 1940. Menurut Darban (1998), banyak orang berharap raja muda Yogyakarta ini akan mengubah Keraton. Pada saat itu, Lucian Adams menjabat sebagai gubernur wilayah Yogyakarta Hindia Belanda. Para sultan harus menandatangani perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda sebelum menjadi raja. Pada dasarnya, perjanjian ini membatasi kekuasaan sultan yang berkuasa.

Sekitar dua tahun antara penobatan Sri Sultan dan penyerahan Jepang oleh Belanda terjadi. Yogyakarta kemudian diambil alih oleh Jepang. Selain itu, Jepang tidak begitu kuat. Soekarno

mengumumkan kemerdekaan Indonesia setelah Sekutu mengalahkan Jepang. Proklamasi tersebut mendapat dukungan dari Sri Sultan dan rakyat Yogyakarta.

2 Setelah kembalinya pemerintahan Hindia Belanda, konflik antara Republik Indonesia dan Belanda muncul di mata masyarakat internasional. Sebelum menarik seluruh pasukan Inggris dari Jawa dan Sumatra pada Desember 1946, Inggris menuntut negosiasi gencatan senjata cepat. Pada Perundingan Linggarjati pada 12 November 1946, Indonesia mendapat pengakuan secara de facto. Hasilnya, sebelum Perjanjian Linggarjati, negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat telah mengakui Indonesia secara de facto. Negara-negara lain, seperti Mesir dan Yordania, juga telah mengakui Indonesia secara de jure dan de facto (Kahin, 1995).

18 Belanda melakukan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, menentang Perjanjian Linggarjati. Setelah itu, Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan dan membentuk Komite Jasa-Jasa Baik, atau Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari perwakilan dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi untuk masalah ini. Pada akhirnya, negosiasi dimulai lagi dan Perjanjian Renville disepakati pada Januari 1948. Tapi perundingan di atas kapal USS Renville belum selesai. Perundingan lain masih dilakukan.

3 1 15 Tuntutan Belanda terhadap Amerika Serikat semakin kuat. Kekuatan militer yang ingin dibubarkan oleh Belanda merupakan salah satu ciri kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda tetap berani memulai perang total meskipun gencatan senjata. Mereka terus melakukan serangan politik dan ekonomi untuk menghancurkan Republik Indonesia. Karena ada perbedaan pendapat, Belanda memulai Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

2 Pasukan Belanda memulai serangan ke Yogyakarta dengan pesawat tempur. Lapangan terbang Maguwo yang akan digunakan untuk pendaratan pertama kali dilumpuhkan oleh pasukan mereka. Brigade Marinir Belanda menyerang Yogyakarta dengan roket dan pesawat pembom P-51 dan Spitfire. Belanda dapat mengambil alih Yogyakarta dengan cepat (Kahin, 1995). Segera setelah serangan Belanda, kabinet Republik Indonesia bersidang. Dewan memutuskan bahwa pemerintahan darurat di Sumatera akan dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara sampai Presiden dan Wakil Presiden ditawan oleh Belanda. Panglima Besar Soedirma akan memimpin TNI dalam perang gerilya.

28 Sementara itu, Belanda membatasi Sri Sultan untuk beraktivitas hanya di dalam Keraton. Ketika mengetahui hal ini, Sri Sultan tidak tinggal diam. Meskipun hanya memimpin strategi di dalam Kraton, Sri Sultan akhirnya bertanggung jawab atas perlawanan terhadap Belanda. Misalnya, Letnan Kolonel Soeharto memimpin Serangan Umum pada 1 Maret 1949. Sebenarnya, Sri Sultan hanya berbicara dengan para pejuang lainnya melalui kurir yang mengenakan pakaian abdi dalem ketika keluar masuk Keraton.

2 Dengan mempertimbangkan apa yang telah disebutkan di atas, jelas bagaimana peran Sri Sultan dalam perjuangan revolusi di Indonesia, terutama selama Agresi Militer Belanda II. Sri Sultan juga berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan tokoh

lain. Pater Meak Parera menyatakan, "Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak hanya dikagumi oleh masyarakat Jawa, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia." Sebagai raja Jawa, ia berpartisipasi dalam perjuangan nasional, menurut Parera (1991). Rasa nasionalisme Sri Sultan dapat berfungsi sebagai contoh yang baik bagi generasi saat ini yang nasionalismenya semakin berkurang.

## METODE PENELITIAN

Menurut Notosusanto (1971), metodologi sejarah terdiri dari empat langkah: historiografi, heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Setelah menentukan subjek penelitian, tahapan heuristik dilakukan untuk mengumpulkan data historis, juga dikenal sebagai data sejarah. Sumber primer dan sekunder dapat memberikan informasi. Sumber primer melibatkan saksi mata. Muhammad, (1999). Seperti Pesan Yang Terhormat Tuan Inggang Sinuwun Kangdjeng Sultan Yogyakarta, Surat Pribadi Sri Sultan kepada Tuan Sudjono, dan Naskah Proklamasi Sri Sultan HB IX tanggal 30 Juni 1949 Kesaksian orang lain dan orang yang tidak hadir pada peristiwa tersebut adalah contoh sumber sekunder (Widja, 1989). Karya Ahmad Adaby Darban tentang Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX dan Sutrisno Kutoyo tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan adalah contohnya. Selain itu, karya lain, seperti Suwarno, PJ (1994), tersedia. (4) Heijboer, Pierre tentang Agresi Militer Belanda untuk Memperebutkan Zamrud yang Terpendam di Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949, dan (5) Sri Endang Sumiyati et al. tentang Koreksi Sejarah Penyerangan 1 Maret 1949. Setelah informasi sejarah dikumpulkan, proses kritik atau verifikasi sumber dimulai. Untuk mencapai hal ini, kritik eksternal memeriksa keaslian dan asal usul sumber, dan kritik internal membandingkan sumber untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan. Proses ini memungkinkan penulis bertanggung jawab atas keaslian data yang digunakan untuk menulis.

Interpretasi atau penafsiran terdiri dari dua bagian: analisis dan sintesis. Analisis menguraikan, sedangkan sintesis menyatukan. Muhammad, (1999). Kedua pendekatan ini sangat penting untuk menafsirkan peristiwa sejarah. Penulis memeriksa berbagai sumber untuk memahami kemungkinan, dan kemudian menggabungkan data untuk menghasilkan fakta sejarah yang akurat. Selanjutnya, historiografi adalah suatu cara untuk menulis, menyajikan, atau melaporkan temuan penelitian sejarah. Menurut Abdurrahman (1999), hasil penelitian sejarah harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian dari awal hingga akhir (menarik kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati pada 20 Juli 1947. Melakukan serangan militer yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama adalah bukti dari pelanggaran ini. Setelah hal ini terjadi, Dewan Keamanan PBB turun tangan dan membentuk Komite Kantor yang Baik yang terdiri dari wakil-wakil dari AS, Australia, dan Belgia. Tujuan dari Komite ini adalah untuk

12 menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Komisi Tiga Negara (KTN0) adalah nama lain Komisi ini. Frank Graham dari Amerika Serikat, Richard Kirby dari Australia, dan Paul van Zeeland dari Belgia adalah anggota KTN. Anggota dari setiap negara kemudian berganti-ganti.

1 Mula-mula, mereka berusaha untuk memahami keadaan dan kesulitan yang akan mereka hadapi.  
1 Untuk itu, sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan, mereka membuat laporan yang disampaikan dan diterima Dewan Keamanan pada tanggal 14 Oktober 1947 dengan bantuan konsul dan pengamat militer. Anggota Komisi Jasa Baik tiba di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1947. Untuk saat ini, Republik Indonesia menolak untuk mengadakan pertemuan dengan Belanda di Jakarta atau Yogyakarta. Republik hanya akan melakukannya di lokasi yang netral. Tobing, 1986

20 Sebuah kesepakatan baru dicapai di pelabuhan Jakarta pada bulan Januari 1948 di atas kapal Amerika Serikat USS Renville. Meskipun Republik masih memiliki banyak wilayah di belakangnya, perjanjian ini mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai garis Van Mook, garis yang dibuat untuk menghubungkan perbatasan Belanda. Dengan menerima perjanjian ini, Republik Indonesia memperoleh simpati Amerika Serikat, yang merupakan langkah penting dalam perjuangan selanjutnya untuk kemerdekaan.

10 Secara umum, Perjanjian Renville terdiri dari tiga dokumen, yaitu:

1. Garis demarkasi Van Mook diterima dalam perjanjian gencatan senjata.
1. Konsep utama dari Kebijakan Renville adalah komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dan dengan bantuan KTN.
1. Enam pasal tambahan KTN termasuk ketentuan bahwa selama masa transisi, Belanda akan memegang kedaulatan atas Indonesia hingga kemudian diserahkan kepada NIS (Amerika Serikat Indonesia).

1 Dua naskah pertama ditandatangani pada 17 Januari 1948, dan yang terakhir pada 19 Januari 1948. Bagi Republik Indonesia, Perjanjian Renville akan membantu meningkatkan kekuatannya. Selain itu, simpati dunia terhadap Republik Indonesia meningkat karena Republik Indonesia bersedia menerima petunjuk KTN yang mewakili PBB dan selalu menunjukkan sikap cinta damai.

29 Menurut Notosutardjo, Perjanjian Renville terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah Perjanjian Gencatan Senjata antara Belanda dan Republik Indonesia pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik bersenjata. Langkah ini bertujuan untuk mengakhiri konflik dan menciptakan keamanan. Perjanjian ini menetapkan bahwa kedua belah pihak akan melakukan gencatan senjata dalam waktu 48 jam setelah penandatanganan, dengan penarikan pasukan sesuai dengan prosedur status quo. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, wilayah baru dibentuk untuk mempertahankan status quo. Di wilayah yang tidak diduduki, polisi sipil, bersama dengan Komisi Tiga Negara, bertanggung jawab menjaga ketertiban. Stabilitas dicapai melalui larangan sabotase dan propaganda. Secara keseluruhan, perjanjian ini meletakkan

dasar bagi penyelesaian politik yang akan datang dan menanamkan harapan untuk keamanan abadi.

1 Kedua, Perjanjian Dasar Politik Renville, atau Perjanjian 17 Januari 1948, menetapkan komitmen untuk menyelesaikan konflik politik di Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura berdasarkan asas Linggarjati. Perjanjian ini memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berbicara, berkumpul, dan menyiarkan berita tanpa mempromosikan kekerasan. Hanya dengan persetujuan penuh dan sukarela dari penduduk setempat pemerintahan daerah dapat diganti. Setelah perjanjian ditandatangani, juga dilakukan persiapan untuk mengurangi kekuatan militer secara bertahap. Reformasi ekonomi, perdagangan, dan transportasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia.

30 Diputuskan juga untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun setelah penandatanganan perjanjian. Ini akan memberi rakyat Indonesia kesempatan untuk memilih posisi politik mereka sendiri dalam hubungannya dengan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS akan dibuat oleh dewan yang dipilih secara demokratis. Perjanjian ini juga menetapkan kerja sama antara Belanda dan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan federasi yang berdaulat dengan konstitusi demokratis. Ini termasuk pembentukan Uni RIS dengan Kerajaan Belanda dan bagian-bagiannya di bawah pemerintahan raja Belanda yang turun-temurun.

1 Ketiga, perjanjian Komisi Tiga Negara (KTN) tanggal 19 Januari 1948 menetapkan dasar perundingan untuk penyelesaian politik. Ini mencakup penyerahan Hindia Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah pimpinan Keturunan Raja Belanda. Status Republik Indonesia (RI) adalah RIS. Sebelum konstitusi NIS diubah, pemerintah federal sementara akan memberikan negara-negara bagian perwakilan yang adil. Jika terjadi pertikaian politik selama masa transisi, KTN dapat dilanjutkan. Dalam waktu enam bulan hingga satu tahun, plebisit akan diadakan di Jawa, Sumatera, dan Madura untuk menentukan partisipasi dalam RI atau bagian lain dari NIS. Setelah batas negara bagian ditentukan, perwakilan dari masing-masing negara bagian akan berkumpul untuk membentuk konstitusi. Sesuai dengan perjanjian Linggarjati, perundingan akan diadakan untuk membangun hubungan khusus dengan NIS jika negara-negara bagian menolak konstitusi NIS.

1 Isi Perjanjian Renville ini merugikan Republik Indonesia, dan banyak orang mengecam PM Amir karenanya. Pengepungan Belanda terhadap ibu kota Republik Indonesia semakin ketat dengan mendirikan negara boneka di wilayah yang dikuasainya. Ini mengakibatkan jatuhnya kabinet PM Amir, yang merupakan delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville.

Karena diperlukan pemerintahan yang kuat untuk menerapkan perjanjian Renville dan karena situasi militer yang sulit karena konflik dengan Belanda dan masalah lain, kabinet baru harus

dibentuk. Namun, baik Partai Masyumi maupun PNI menolak untuk menjabat sebagai pemimpin kabinet. (Moejanto, 1988).

Pada akhirnya, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Hatta untuk membentuk kabinet. Masyumi dan PNI mendominasi kabinet. Rekomendasi kabinet ini terdiri dari empat pasal

1. Mengikuti ketentuan Perjanjian Renville dan melanjutkan perundingan dengan Belanda melalui KTN
2. Percepat pembentukan NIS yang berdaulat dan mandiri.
3. Rasionalisasi Militer
4. kembali memperbaiki bekas perang dan pendudukan Jepang.

TNI, khususnya Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Nasution, mengalami kesulitan ketika Perjanjian Renville dilaksanakan. Sesuai dengan perjanjian garis sempadan Van Mook, pasukan Divisi Siliwangi yang tersebar di Jawa Barat harus meninggalkan wilayahnya menuju wilayah Republik. Nanti, pasukan tersebut akan berpindah ke daerah yang merupakan wilayah Divisi IV yang berpusat di Solo. Kutipan berikut menunjukkan betapa cepatnya pasukan Siliwangi berpindah:

“Kami harus mematuhi dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah! Meskipun hati kami hancur, kami pergi dan berhijrah, meninggalkan semua yang kami cintai, seperti rumah, saudara, dan teman seperjuangan di Jawa Barat. Semua yang kami cintai, selamat jalan. Sampai jumpa lagi! Kami bersumpah dengan tulus bahwa kami akan kembali, Insya Allah” ..(Moejanto, 1988).

Belanda tidak segera menunjuk wakilnya untuk berunding dengan Republik Indonesia pada pertengahan Maret 1948, sehingga perundingan melalui KTN baru dapat dilanjutkan. Penundaan ini tampaknya disengaja dan terkait dengan pembentukan wilayah Madura, Pasundan, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan yang diambil Belanda dari Republik Indonesia. Pembentukan Pemerintah Federal Sementara yang disponsori Belanda juga dibarengi dengan pembentukan negara-negara bagian tersebut. Karena Republik Indonesia terus memperluas hubungannya dengan negara lain, Belanda menuduh Republik Indonesia melanggar Perjanjian Renville. (Moejanto, 1988).

Belanda membentuk Majelis Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federale Overleg/BFO) pada bulan Juli. Majelis ini terdiri dari para pemimpin negara bagian. Dengan atau tanpa persetujuan Republik Indonesia, mereka bermaksud membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang federal. Menurut Ricklefs (1991), keadaan Republik Jawa pada tahun 1948 sangat tidak stabil. Karena masuknya orang dari luar Republik yang harus ditinggalkan, kekuasaan Republik Indonesia semakin terbatas. Dengan blokade oleh Belanda, kesulitan semakin parah, dan penduduk juga kekurangan beras.

Karena kebuntuan, perundingan gagal berjalan. Akibatnya, KTN kembali mencoba membuka perundingan. Rencana penyelesaian yang diusulkan oleh Merle Cochran, perwakilan AS yang baru dilantik, dikenal sebagai Rencana Cochran. Secara keseluruhan, laporan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Menjaga hubungan internasional Republik
2. Pemerintah Amerika Serikat mengontrol seluruh angkatan bersenjata dan perlengkapannya, termasuk Tentara Kerajaan Belanda di Indonesia.
3. Utang Hindia Belanda kepada Belanda setelah tahun 1942 akan dinegosiasikan. Tobing, 1986

Negara Kesatuan Republik Indonesia kecewa dengan usulan Cochran karena dianggap mengorbankan beberapa kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Belanda tidak puas karena dianggap tidak memadai. Hasilnya, upaya Merle Cochran gagal. Selain itu, perundingan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Belanda Stikker secara langsung gagal. Pada 11 Desember 1948, Belanda menolak perundingan dengan syarat tersebut. Belanda juga menyatakan bahwa Pemerintah Federal Sementara akan tetap beroperasi tanpa menunggu partisipasi Amerika Serikat.

Hatta meminta Cochran untuk membuka kembali perundingan pada 13 Desember 1948. Hatta menyatakan bahwa Republik Indonesia bersedia mengakui hak veto Komisaris Tinggi Mahkota, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan Hindia Belanda, dengan batasan tertentu. Belanda memberikan ultimatum empat hari kemudian, menuntut Republik Indonesia untuk menyetujui tuntutanannya dalam waktu 18 jam. Selain itu, ditegaskan bahwa Republik Indonesia akan dimasukkan ke dalam federasi dengan status yang sama seperti negara bagian lainnya. 18 jam bukanlah waktu yang lama atau terlalu singkat bagi Republik Indonesia untuk mempelajarinya.

### Agresi Militer Kedua Belanda

Negosiasi otomatis terhenti saat Belanda secara sepihak melanjutkan penyelesaian federal. Hal ini juga tidak akan memenuhi keinginan Belanda untuk memberikan tanggung jawab atas keamanan dalam negeri selama masa transisi. Belanda juga menawarkan opsi untuk memasukkan tentara Indonesia ke dalam pasukan federal. Mulai terjadi ketidakpastian, yang menghasilkan situasi yang sangat penting dan berbahaya bagi gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Tuntutan Belanda terhadap Republik Indonesia menjadi semakin mendesak dan kuat. Salah satu ciri kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia adalah kekuatan militer, yang Belanda ingin dibubarkan. Belanda dengan cepat memulai perang total, bahkan saat gencatan senjata telah dicapai. Mereka terus melakukan serangan ekonomi dan politik untuk menghancurkan Republik Indonesia. Menurut Nasution (1979).

Pada 19 Desember 1948, Belanda mengambil tindakan militer karena ketidaksepakatan antara mereka. Agresi Militer Belanda Kedua adalah nama serangan militer tersebut. Sekitar pukul 06.00, pesawat Belanda memulai serangan ke Yogyakarta. Mereka menembak jatuh lapangan udara Maguwo, serta jalan raya, barak tentara, dan bangunan pemerintahan. Pasukan terjun payung dari Belanda juga dikirim. (Tobing, 1986) menggambarkan Ibu Juariah Suhardi tentang serangan Belanda terhadap Yogyakarta sebagai berikut:

“TNI juga tidak menyadari bahwa Yogya diduduki Belanda saat itu. Penduduk tahu bahwa itu adalah latihan pasukan Indonesia, meskipun pesawat sudah menderu sekitar pukul enam pagi. Oleh karena itu, keadaan tidak stabil pada saat itu. Baru pukul setengah tujuh berita tentang pendudukan Belanda tiba. Ternyata parasit pasukan Belanda telah dibuang oleh Belanda. Orang-orang di sana ketakutan dan banyak yang mengungsi” (13/01/2011).

Selanjutnya melakukan wawancara dengan H. Ollot Sajiman menyatakan sebagai berikut:

“Yogyakarta tidak menunjukkan perlawanan pada saat itu. Seluruh pasukan utama yang berbasis di Yogyakarta berada di luar kota untuk melakukan latihan perang. Beberapa regu jaga, satuan yang menjaga asrama dan kantor bersama taruna TNI yang bermarkas di Maguwo, adalah satu-satunya prajurit yang tetap berada di kota. Panglima TNI daerah Yogyakarta telah menyiapkan strategi untuk menghadapi serangan musuh beberapa hari sebelum peristiwa militer Belanda ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, logistik di luar kota juga telah disiapkan” (22/12/2010).

1  
1  
Direncanakan akan dilakukan latihan perang mulai tanggal 18 Desember 1948 untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi pasukan di Yogya. Akibatnya, pada tanggal 18 Desember pagi, seluruh pasukan yang ada di Yogya meninggalkan kota beserta seluruh perlengkapannya, kecuali pasukan pengawal. Oleh karena itu, latihan perang tersebut secara tidak sengaja telah memungkinkan TNI untuk menyelamatkan perlengkapannya, rakyatnya, dan kota Yogya dari penderitaan dan kerusakan. Mengenai hal ini, Soekarno mengatakan:

“Belanda menduduki bandara setelah bom dilepaskan selama satu jam, diselingi dengan tembakan roket dari pesawat P-51. Pesawat Spifire Amerika yang terbang rendah menghujani peluru secara merata di jalan. Pesawat-pesawat itu membuat udara Yogyakarta gelap. 1.000 pasukan terjun payung mengambil kantor pos, radio, dan membakar mobil. Tentara Republik yang hancur di Yogya ditawan” Adam (1984).

Pasukan Belanda beralih ke kota Yogyakarta setelah berhasil menangkap Maguwo. Meskipun tidak ada banyak pertarungan dari pihak Republik, pertarungan tersebut mampu memperlambat

1 pasukan Belanda. Di kediaman Presiden Soekarno, para anggota kabinet Republik berkumpul untuk mengadakan sidang darurat saat pasukan Belanda bergerak memasuki kota.

1 Pukul 08:30, seluruh Korps Kopassus sudah berada di Maguwo, dan pasukan Belanda dapat memulai perjalanan menuju Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak 7 kilometer di sebelah barat Maguwo dalam perjalanan ke Yogyakarta. Jalan lama—jalan dari Solo ke Yogyakarta—adalah yang paling penting. Jalan Wonosari-Yogyakarta dapat diakses langsung ke pusat kota sedikit ke arah selatan lapangan terbang. Selama pergerakan ini, pasukan Belanda menggunakan kedua jalan ini. Separuh pasukan kopassus dan 1-15 RI, serta satu batalyon dari Brigade T yang baru dibentuk, menggunakan jalur utara. Pasukan kopassus yang tersisa berjalan melalui ladang dan kota-kota di sebelah selatan lapangan terbang menuju jalan Wonosari-Yogyakarta. Heijboer, tahun 1998.

1 Soekarno memutuskan untuk menyerah dengan hormat selama sidang kabinet Republik Indonesia di Istana Kepresidenan. Kemudian para menteri memilih Menteri Sjafruddin Prawiranegara sebagai kepala pemerintahan darurat. Saat itu, Syafruddin berada di Bukit Tinggi, ibu kota Republik Sumatera. Selain itu, Hatta terus memberikan pernyataan resmi tentang hal-hal yang berkaitan dengan militer. Pernyataan ini, yang dibuat sebagai tanggapan atas desakan Kolonel Simatupang, memberikan perintah kepada tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan pemerintah dalam bentuk apa pun.

Dengan demikian, keputusan Sidang Kabinet adalah sebagai berikut.

1. Agar dunia bersimpati dengan Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta tetap berada di Gedung Negara sebelum Belanda menangkap mereka.
- 1 2. Memberikan wewenang kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Sumatera, untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
- 1 3. Di bawah pimpinan Panglima Tertinggi Soedirman, Tentara terus berjuang gerilya.
- 1 4. Sri Sultan, Menteri Koordinator Negara Bidang Keamanan, masih tinggal di kota tersebut.

3 Pada akhirnya, pada 20 Desember 1948, Soekarno harus menghadapi Jenderal Meijer, panglima pasukan Belanda di Jawa Tengah. Jenderal ini meminta agar Soekarno memberikan perintah gencatan senjata kepada TNI, tetapi Soekarno menolaknya dengan keras karena dia sudah berstatus sebagai tawanan dan tidak dapat memberikan perintah presiden. Great, 1983).

1 Tanggal 22 Desember 1948, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tuan Assaat, Tuan Ali Sasstroamidjojo, dan Komodor Udara Suriadarma diterbangkan ke Pulau Bangka. Di sana, Soekarno, Syahrir, dan Salim terpisah dan diterbangkan ke Brastagi, lalu ke Prapat, Danau Toba (Sumatera Utara).

Dengan demikian, ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI. Golongan pertama diwakili oleh Bapak Sjafruddin Prawiranegara dan rekannya, yang memimpin PDRI di Sumatera. Di sana, mereka tetap berhubungan dengan TNI yang melakukan perang gerilya. TNI, di bawah pimpinan Pangsar Soedirman, melakukan perang gerilya di

pedalaman dengan bantuan seluruh penduduk desa. Golongan ketiga terdiri dari diplomat, termasuk LN Palar, yang berada di luar negeri untuk berjuang secara diplomatik. Golongan berikutnya terdiri dari Sri Sultan dan penduduk Yogyakarta yang tetap berada di ibu kota sebagai "penjaga gawang" untuk menjaga proklamasi kemerdekaan Indonesia.

### 1. Posisi tegas Sultan

Sementara itu, Paku Alam VIII, wakil kepala daerah, dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan, mengundurkan diri sebagai ibu kota Republik Belanda. Ini dilakukan agar Belanda yang menguasai Yogyakarta bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi di sana. Selain itu, Sri Sultan meminta pegawai negeri sipil untuk membantu TNI, yang akan bertindak sebagai pemerintahan militer. Instruksi ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan pamong praja untuk melakukan perlawanan gerilya di bawah pimpinan Sri Sultan (Soewarno, 1994).

Selama beberapa minggu berikutnya, di Jawa dan Sumatra, angkatan bersenjata Belanda, dengan dukungan angkatan udara, berhasil mengambil kembali kota-kota penting yang masih dikuasai Republik. Belanda memberi tahu dunia bahwa mereka hanya menghadapi sedikit resistance dari Republik dan bahwa orang-orang menerima pasukan mereka sebagai penyelamat. Mereka juga menyensor berita dari Indonesia, sehingga fakta sebenarnya tidak diketahui (Kahin, 1995).

Belanda mengambil alih ibu kota Republik Indonesia, TNI tengah melakukan perang gerilya, dan para pemimpin negara ditawan. Satu-satunya anggota kabinet Indonesia yang berada di Yogyakarta adalah Sri Sultan, yang wajar karena dia adalah pemimpin adat di daerah dan tidak mungkin meninggalkan rakyatnya. Bersamaan dengan Agresi Militer Belanda, ia terakhir kali bertemu langsung dengan anggota kabinet lainnya sebelum sidang kabinet. Belanda melarang Sri Sultan bertemu dengan Soekarno dan para pemimpin lainnya sebelum mereka ditawan.

Belanda juga melarang Sri Sultan keluar dari wilayah istana. Ini mirip dengan ditahan di rumah oleh tentara Belanda. Berikut adalah pernyataan Sri Sultan.

“Karena Tentara Belanda sudah tiba di Kantor Pos, saya kembali ke Istana dan menunggu di sana. Sekitar pukul lima sore, komandan Belanda Kolonel Van Langen datang kepada saya dan memberikan saya peta kota Yogya dan tempat Istana dikurung dengan tinta merah. Van Langen meminta saya untuk tidak keluar dari lingkaran merah itu untuk alasan keamanan, bukan untuk kepentingan saya sendiri”. Carey, 1986.

Belanda menyatakan bahwa Keraton, Puro Pakualam, dan Kepatihan adalah wilayah kekebalan yang tidak dapat diganggu, sehingga Sri Sultan dan Sri Paku Alam tidak dapat diganggu. Karena mereka adalah faktor utama, Belanda tidak berani mengganggu mereka. Raja-raja ini menciptakan ikatan emosional dan sosial-budaya antara penduduk setempat dan mengeksplorasi kekuatan di luar kemampuan dan ukuran masyarakat umum. Oleh karena itu, gangguan terhadap mereka akan sangat menggemparkan dan menimbulkan konflik dengan negara lain.

1 Strategi Belanda dan pengikutnya, yaitu menghancurkan Republik Indonesia dengan menghancurkan Ibu Kota Yogyakarta, telah berhasil dilaksanakan. Namun, setelah mereka menguasai kota, muncul masalah yang sangat penting: pengambilalihan pemerintahan, terutama Yogyakarta. Secara umum, menguasai pemerintahan adalah dengan memaksa pemerintahan sipil yang telah diberi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di sinilah Sri Sultan menantang Belanda.

1 Belanda kemudian bergantung pada Sri Sultan, Raja Yogyakarta, Gubernur Yogyakarta, dan menteri Kabinet Indonesia, dalam posisinya yang semakin putus asa di dunia internasional. Belanda meminta Sri Sultan untuk bekerja sama dan menjalankan pemerintahan dengan kontrol Belanda. Namun, upaya Belanda untuk mendorong Sri Sultan untuk meninggalkan Republik Indonesia gagal.

1 Belanda mengirimkan utusan ke Sri Sultan berkali-kali, seperti Residen EM Stok, Dr. Berkhuus dan Kolonel Van Langen, penguasa militer Yogya, serta orang Indonesia yang menduduki jabatan tinggi di Belanda, termasuk profesor Sultan Hamid II dan Husein Djajadiningrat. Bahkan tanpa pertemuan langsung, Sri Sultan memberikan tanggapan yang mengecewakan kepada mereka semua. Untuk menanggapi bujukan mereka, Sri Sultan mewakili Pangeran Prabuningrat, saudara tirinya. (Poespaningrat, 2008) Ketegasan Sri Sultan menunjukkan sifat seorang negarawan sejati dan menunjukkan bahwa beliau adalah raja Jawa yang menganut prinsip tan kena wola wali, suatu falsafah luhur yang harus dipegang teguh oleh raja-raja Jawa.

Bujukan Belanda itu datang dengan imbalan yang luar biasa, bukan hanya yang biasa. Belanda berjanji akan memberikan kekuasaan regional kepada Sri Sultan di Kedu dan Banyumas, serta beberapa wilayah di Jawa Timur. Karena bujukan tidak berhasil, Belanda kemudian memberikan jabatan Wali Negara Super kepada Sri Sultan. (Mochtar, 1982) Jika Sri Sultan bersedia menerima jabatan tersebut, itu menunjukkan bahwa Sri Sultan telah memperoleh kekuasaan yang selama ini diperebutkan oleh raja-raja sebelumnya di Mataram, bahkan dengan mudah. Berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang mengutamakan kekuasaan, Sri Sultan saat ini berbeda.

1 Kini Belanda menyadari bahwa Sri Sultan bukanlah seorang raja yang dapat dengan mudah disuap dengan janji kekuasaan atau jabatan. Oleh karena itu, Belanda menghadapi tantangan yang signifikan dalam membangun pemerintahan boneka seperti yang telah dilakukan oleh negara lain. 1 Belanda salah memahami sikap dan sifat Sri Sultan.

## 2. Bantuan Sri Sultan terhadap Gerilyawan

1 Sebelum Panglima Tertinggi Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memulai perang gerilya, ia mengeluarkan Perintah Kilat Nomor 1/PB/D/48, yang memerintahkan seluruh Angkatan Perang

1 untuk menerapkan rencana yang telah disusun untuk menghadapi serangan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1945, skrip Perintah Kilat segera diserahkan kepada Kapten Suparjo Rustam untuk disampaikan kepada Kadet Utoyo Kolopaking. Kadet Utoyo Kolopaking segera menghubungi RRI Yogyakarta untuk menyiarkan skrip tersebut.

1 Komando cepat ini mengubah strategi perlawanan pasukan Republik dari perang linier menjadi perang gerilya. Untuk membangun basis perlawanan gerilya, pasukan Republik mundur dari kota ke desa-desa. Sistem pertahanan Wehrkreise digunakan sebagai perlawanan. Istilah ini berasal dari bahasa Jerman, di mana "wehr" berarti pertahanan dan "kreise" berarti lingkaran. Jadi, wehrkreise adalah lingkaran pertahanan (Nasution, 1977). Sebagai hasil dari sistem ini, wilayah pertempuran terbagi menjadi lingkaran Perang Rakyat Total dan Perang Gerilya. Advice, 2002).

1 Dalam hal ini, Yogyakarta adalah bagian dari Wehrkreise III, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Wehrkreise III dibagi menjadi beberapa Sub Wehrkreise (SWK), yang berakhir sebagai berikut.

1. SWK 101 di Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Marsudi,
2. SWK 102 di Bantul dipimpin oleh Mayor Sarjono,
3. SWK 103 Gamping dipimpin oleh Letkol Suhud,
4. SWK 103A Godean dipimpin oleh Mayor V. Sumual,
5. SWK 104 di Sleman dipimpin oleh Mayor Sukasno,
6. SWK 105 di Yogya Timur dipimpin oleh Mayor Sujono, dan
7. SWK 106 di Kulon Progo dipimpin oleh Letkol Sudarto.

1 TNI melakukan pertahanan gerilya sesuai dengan perintah Panglima Tertinggi Soedirman. Hal ini didukung sepenuhnya oleh Sri Sultan, yang memberikan perbekalan, ratusan gulden, dan lainnya kepada gerilyawan Istana untuk melindunginya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Istana adalah wilayah pertahanan yang pasukan Belanda tidak dapat masuk tanpa izin Sri Sultan. Akibatnya, para gerilyawan tampaknya cukup aman untuk bersembunyi di dalamnya. Sri Sultan tidak hanya melindungi para gerilyawan, tetapi juga memberikan bantuan finansial kepada mereka yang kurang beruntung. Dana tersebut diberikan kepada tentara gerilya selain kepada pegawai di berbagai kementerian. Dia menyatakan dalam wawancara dengan Juariah Suhardi bahwa:

“Para gerilyawan biasanya menyerang pos-pos Belanda pada malam hari. Pada siang hari, mereka kembali ke markas masing-masing dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Pada siang hari, para gerilyawan itu seperti "hantu" dan bersembunyi di dalam Keraton, Pura Pakualaman, kompleks Taman Siswa, dan bangunan-bangunan Pangeran. Selain itu, atas izin Sri Sultan, perbekalan senjata Jepang, termasuk granat dan mesiu, disimpan di Bangsal Kencono di sebelah selatan Pagelaran Keraton. Seperti rumah-rumah para pangeran di sekitar keraton yang dipenuhi dengan gerilyawan” (13/01/2011),

16 Keraton Sri Sultan terlihat seperti rumah bagi para pejuang yang tidak berani menghadapi serangan Belanda. Secara strategis dan politik, serangan Belanda ke Yogyakarta tidak berhasil, kata Himawan Soetanto. Belanda sangat percaya bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan

TNI dan Republik Indonesia dengan serangan militer (Soetanto, 2006). Meskipun Belanda meningkatkan kekuatan militernya, TNI meremehkan kemampuan Belanda dan keinginan untuk berperang. TNI memperoleh kemenangan dalam perang gerilya. Selain itu, kondisi alam memungkinkannya.

“Beruntunglah kita, karena Allah SWT telah memberikan kita gunung, lembah, hutan, sungai, dan kekayaan alam lainnya yang membuat kita mampu bertahan dalam peperangan gerilya melawan musuh yang memiliki persenjataan yang lebih lengkap, dengan jiwa dan semangat juang yang lebih teguh dari lawan kita,” kata Panglima Soedirman dalam pidatonya di hadapan pasukan TNI.Tjkropanolo (1992).

### Serangan Umum 1 Maret 1949

Belanda menahan Sri Sultan di Istana, tetapi dia tidak tinggal di sana. Dengan mengusir Belanda yang sudah bercokol jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, Sri Sultan menunjukkan cintanya kepada Republik. Dengan radio Istana, Sri Sultan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan dunia internasional, terutama masalah Indonesia di forum diplomatik PBB. Dia mendengar bahwa PBB akan mengadakan pertemuan pada akhir Februari 1949 untuk membahas masalah Indonesia-Belanda. Sejak Belanda mengambil alih Yogyakarta, Belanda telah mengatakan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa Republik Indonesia adalah negara yang merdeka. Setelah mendengar berita tersebut, Sri Sultan berpikir untuk mengatakan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa Republik Indonesia tidak hancur seperti yang dipikirkan Belanda. telah runtuh dan TNI juga runtuh, tetapi Republik Indonesia tetap kuat dengan pemerintahan darurat di Sumatera, dan TNI tetap utuh dengan berperang gerilya dengan para pemimpinnya di pedalaman.

#### 1. Persiapan dan Pelaksanaan Serangan:

Sri Sultan memutuskan untuk mendorong para gerilyawan untuk melakukan penyerangan yang akan mengejutkan Belanda dan mengganggu pasukan Belanda. Akibatnya, keadaan yang membuat Belanda tertekan menyebar ke dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan cara yang tepat karena mempertahankan kedaulatan NKRI hanya dapat dicapai melalui diplomasi tanpa bantuan dari dorongan lain, seperti menunjukkan kekuatan militer. Strategi ini akhirnya mengarah pada Serangan Umum pada 1 Maret 1949. Untuk mencapainya, Sri Sultan harus berkonsultasi dengan Panglima Soedirman—yang saat itu melakukan perang gerilya—sebagai langkah pertama. Selanjutnya, Sri Sultan memerintahkan sekretarisnya, Selo Sumarjan, untuk menulis surat kepada Jenderal Soedirman meminta angkatan darat untuk menunjukkan kekuatan mereka (Chidmad et al., 2001). Karena jaringan telekomunikasi tidak ada, surat ini dikirim melalui kurir. Setelah Jenderal Soedirman menyetujui dan menerima surat ini, Sri Sultan diminta untuk berbicara dengan komandan lokal, Letnan Kolonel Soeharto (Panglima Wehrkreise III).

SWK 101/Kota di dalam kota, yang bertanggung jawab untuk mengatur pasukan dan perbekalan WK III, lebih menonjol di antara SWK lainnya. Letjen Marsoedi membagi wilayah kota menjadi enam sektor untuk meningkatkan efektivitas (SESKOAD, 1989). Letnan Marsoedi membagi kota menjadi enam distrik: (a). Sektor I terdiri dari wilayah Barat hingga Ngabean Selatan, dipimpin oleh Letnan Wuston; Sektor II terdiri dari wilayah Timur, dipimpin oleh Sudomo; Sektor III terdiri dari wilayah Selatan hingga Ngabean Utara, dipimpin oleh Mochtar; dan Sektor IV, dipimpin oleh Rakido, mencakup wilayah Secodiningratan hingga Pakualam Utara dan Malioboro Timur. Sektor V, dipimpin oleh Supriyadi, mencakup jalur kereta api utara hingga Tugu Timur; dan Sektor Barat.

1 Selain itu, SWK 101 akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Letkol Soeharto saat dia pergi ke Istana untuk menerima perintah dari Sri Sultan. Setelah menerima surat undangan dari Sri Sultan yang mengundang Letkol Soeharto ke Istana, SWK 101 akan melakukan pengamanan dengan nama Pagar Betis. Dengan pengawasan yang ketat, Letkol Soeharto digiring oleh pemandu SWK 101 berjalan kaki melewati Desa Taman, melewati Desa Ngadisuryan di sebelah timur, dan akhirnya tiba di Preboyo. Setelah itu, Letkol Soeharto digiring menuju pintu gerbang Margoleno, berpakaian seperti para abdi dalem Kejawen. Letkol Soeharto diterima di lokasi itu dan kemudian digiring ke ruang Prabuningratan. Karena GBPH Prabuningrat menunggu di luar ruangan, Sri Sultan dan Letkol Soeharto berbicara secara pribadi selama pertemuan (Chidmad et al., 2001).

1 1 Sri Sultan meminta Letkol Soeharto melakukan sesuatu. Diharapkan pertunjukan kekuatan ini akan meningkatkan semangat juang TNI dan para pejuang serta memberi tahu dunia bahwa kekuatan Belanda tidak akan menghancurkan Republik Indonesia. Setelah bertemu dengan Sri Sultan, Letkol Soeharto kemudian membuat strategi penyerangan. Ini menunjukkan bahwa Letkol Soeharto bertanggung jawab untuk menerjemahkan arahan atasannya di lapangan ketika Serangan Umum terjadi pada 1 Maret 1949. oleh Tim Lai (2000)

8 25 Serangan akan dilakukan pada siang hari, tidak seperti serangan gerilya yang biasa dilakukan pada malam hari. Selain itu, serangan akan dilakukan di berbagai lokasi secara bersamaan. Sebelum tanggal 1 Maret, pasukan Belanda menyerang beberapa pos Belanda. Mereka mengganggu jalur telepon, kabel, rel kereta api, dan jalur komunikasi lainnya. Semua SWK bersiap untuk serangan besar. Pada tanggal 9 dan 16 Januari 1949, serta 4 Februari 1949, perintah Kolonel Bambang Sugeng—yang dalam hierarki militer bertanggung jawab atas WK III yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto—dilaksanakan dengan menyerang posisi-posisi Belanda. Wawancara dengan H. Ollot Sajiman

“para gerilyawan sudah mulai memasuki kota malam sebelum SU 1 Maret. Mereka bersembunyi di rumah orang lain, yang memastikan mereka aman. Seluruh komunitas bersatu untuk menentang Belanda dalam apa yang disebut sebagai "bela semesta total". Bahkan dapur umum disiapkan untuk membantu logistik gerilyawan. Tampaknya tidak ada masalah bagi para pejuang untuk mendapatkan logistik makanan yang diperlukan, meskipun sistem gerilya digunakan. Namun, tindakan Sri Sultan, yang telah meminta pemerintah daerah untuk membangun gudang logistik di setiap kecamatan” 22/12/2010.

Pagi harinya, bunyi sirine yang menandakan berakhirnya jam malam yang ditetapkan Belanda terdengar bersamaan dengan tembakan yang terdengar dari seluruh kota Yogyakarta. Pasukan Belanda tidak mengantisipasi serangan, jadi mereka hanya berusaha mempertahankan diri. Mochtar, 1982: Setelah serangan yang mengerikan, pasukan Belanda meminta bantuan dari Semarang dan Magelang. Pasukan gerilya ini terdiri dari TNI, Polri, AURI, Tentara Pelajar, dan Laskar, dengan total sekitar 2000. Selain itu, kelompok WK III di sekitar Yogyakarta, seperti Kompi Suwarno dari Yon Daryatmo Muntilan dan Kompi Sudarsono dari Yon Sruharjono Purworejo, dan Peleton Sulaksono dari Yon Sunitisiono dari WK I Divisi II/M Klaten, meningkatkan penyerangan mereka. Pasukan Belanda memasuki kota setelah mereka mundur. Setelah menduduki Yogyakarta selama kurang lebih enam jam, bantuan pasukan Belanda dari Semarang tiba pada pukul 11.00. Untuk menghindari lebih banyak korban, pasukan gerilya mundur pada pukul 13.00.

## 2. Pentingnya Serangan Umum 1 Maret:

Meskipun hanya berlangsung beberapa jam, serangan ini dapat dianggap berhasil. berhasil mencapai tujuan militer, yaitu meningkatkan moral personel dan mendorong mereka untuk berperang gerilya. oleh Tim Lai (2000) Kesuksesan ini memalukan Belanda, yang selama bertahun-tahun telah menyebarkan rumor bahwa Republik Indonesia dan TNI tidak ada lagi. Anggota KTN juga berada di Yogyakarta saat penyerangan terjadi untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Ironisnya, para anggota KTN pergi ke Yogyakarta atas permintaan Belanda, seolah-olah mereka ingin memberi tahu orang Belanda bahwa Belanda telah berhasil membunuh Republik Indonesia. Berita itu kemudian dikirim oleh Sri Sultan ke Bukittinggi, tempat Syafruddin Prawiranegara dan pejabat lainnya memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah kemenangan itu. Dari Bukittinggi, berita itu kemudian dikirim ke Amerika Serikat melalui New Delhi. Berita tentang Serangan Umum 1 Maret membuka pintu politik internasional tentang keberadaan Republik Indonesia. Istana menjadi tegang setelah pasukan Republik meninggalkan kota karena pasukan Belanda mulai berdatangan.

Setelah itu, pasukan Belanda datang ke istana karena mereka pikir gerilyawan bersembunyi di sana di bawah perlindungan Sri Sultan. Setelah tank Belanda menghantam salah satu pintu gerbang istana, komandan pasukan memaksa Sri Sultan untuk bertemu komandan. Panglima pasukan Belanda di wilayah Kota Yogyakarta saat itu, kolonel Van Langen, langsung menuduh Sri Sultan bahwa ada tembakan atau serangan dari dalam Keraton. Namun, Sri Sultan menolak tuduhan tersebut. Beberapa hari kemudian, terdengar tembakan keras dari sebuah tank di depan rumah GBPH Prabuningrat, yang dekat dengan pintu masuk Keraton. Jenderal Meijer, Panglima Teritorial dan Panglima Pasukan Belanda di Jawa Tengah, mengirimkan surat permintaan kepada Kapten de Jonge, yang berfungsi sebagai ajudan Kolonel van Langen, untuk mengatur pertemuan dengan Sri Sultan.

Di bawah pengawasan pasukan lapis baja, jenderal Meijer dan rombongan menemui Sri Sultan. Kolonel DBA van Langen, yang bertindak sebagai Panglima pasukan Belanda di Yogyakarta; Dr.

1 Angenen, Stok, yang bertindak sebagai Residen di Yogyakarta; dan Kapten de Jonge, yang bertindak sebagai asisten van Langen. Pada pertemuan tersebut, Sri Sultan diminta untuk menghentikan sikap anti-Belandanya dan mendukung gerilyawan. "Yogyakarta sudah tertib sebelum Belanda datang," jawab Sri Sultan. "Kalau sekarang kacau, kenapa harus saya yang membereskannya?" tegas Sri Sultan. "Kalau tuan-tuan mau memperlakukan Keraton seperti ketika arsip saya dirampas tentara Belanda di Kepatihan, lebih baik saya dibunuh saja." (Poespaningrat, 2008).

1 Jenderal Meijer dan rombongan terkejut ketika mereka mendengar ketegasan Sri Sultan. Beberapa menit kemudian, mereka dengan sopan meminta izin setelah sebelumnya bersikap sombong dan angkuh. Sri Sultan dapat meredam mereka setelah perdebatan yang keras. Itu adalah pengalaman Sri Sultan saat dia kuliah di sebuah klub debat di Leiden, Belanda. Setelah agresi Belanda dan pendudukan Belanda di Yogyakarta, keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 membangkitkan kembali kepercayaan rakyat kepada TNI. Keberhasilan ini membuat orang percaya pada kemampuan dan kekuatan TNI secara psikologis. Ini adalah apa yang diperlukan untuk mempertahankan semangat perjuangan rakyat dan mempertahankan persatuan melawan Belanda (Widodo, 1988).

1 Untuk membalas dendam atas kejadian memalukan itu, Belanda menyerang posisi para pejuang tanpa pandang bulu di Wonosari, Gunung Kidul. 20 pesawat DC-3 dari Lapangan Andir, Bandung, membawa pasukan terjun payung ke Bandara Gading, Gunung Kidul. Meskipun demikian, tidak ada hasil karena pejuang tidak ada lagi di daerah itu. (Widodo, 1988).

1 Belanda membersihkan kota dan desa sementara para pejuang terus menyerang. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengetahui tentang serangan pada 1 Maret, Dewan Keamanan PBB meminta Belanda untuk segera menghentikan kekerasan di Jawa dan Sumatera. Ini menunjukkan bahwa propaganda Belanda yang bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia salah. Kekuatan militer Republik Indonesia dan kekuatan politiknya sekarang menjadi perhatian masyarakat internasional. India, Burma, Mesir, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Dewan Keamanan PBB mulai menempatkan Belanda di bawah tekanan. Sekarang Belanda menghadapi masalah yang pasti akan menghalangi upayanya untuk mencapai tujuannya. Tekanan terhadap Belanda meningkat setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi baru yang disebut "Proposal Kanada", yang dipilih dengan mayoritas delapan suara, termasuk AS, yang mencakup hal-hal berikut:

- 1 1. Mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta
2. Menghentikan gerilya militer Belanda dan Republik
3. dimulai dengan konferensi Den Haag untuk mencapai kesepakatan akhir (Kahin, 1995).

Terjadi perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda untuk menerapkan keputusan tersebut. Perundingan Roem-Roijen adalah perundingan di mana Moh. Roem dan DRJH van Roijen mewakili Republik Indonesia. Sebagai dasar perundingan, Belanda bersedia

1 mengembalikan pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta dan memberikan Republik Indonesia kedaulatan. Presiden Soekarno meminta Sri Sultan untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dengan Keputusan Presiden yang dikeluarkan di Bangka pada 1 Mei 1949.

6 Saatnya untuk membangun kembali Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menata kembali pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Selain itu, Sri Sultan diberi wewenang untuk mengawasi penarikan pasukan Belanda dan menyiapkan penyambutan kembali para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan, termasuk kedatangan Panglima Soedirman dari perang gerilya.

1 Selain itu, saat KRT. Jatiningrat, SH. diwawancarai, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi 30 Juni 1949 menyiarkan salinannya dari Proklamasi Sri Sultan HB IX, yang berbunyi:

“Sri Sultan kemudian mengeluarkan Proklamasi 30 Juni 1949 setelah pasukan Belanda berangsur-angsur mundur. Tujuan proklamasi adalah untuk menghindari kekosongan pemerintahan sebelum Soekarno-Hatta dan para pemimpin lain kembali ke Yogyakarta. Selain itu, proklamasi 30 Juni 1949 bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang di Yogyakarta tetap mendukung Republik Indonesia dan bersatu dengan Republik Indonesia”.

Kesuksesan ini, tentu saja, adalah hasil dari upaya nasional untuk mengeluarkan Belanda dari wilayah Republik Indonesia. Prajurit dan rakyat sipil menggunakan strategi bela gerilya semesta dalam perjuangan mereka untuk mempertahankan kedaulatan yang telah lama mereka harapkan. Persatuan laskar rakyat seperti ikan dan air, menurut Marsoedi.

“Orang-orang sipil sekali lagi menjadi korban pertama musuh. Di tengah kekuatan musuh, Sri Sultan juga memilih beberapa orang untuk tinggal di Istana. Mereka terus melawan Belanda, dan upaya Belanda untuk menarik Sri Sultan gagal” (Marsoedi, 1987).

Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Sri Sultan adalah tokoh penting di antara tentara dan rakyat yang bersatu, karena peran pentingnya dalam menjaga kedaulatan negara ini.

## Kesimpulan

2 Selama Agresi Militer Belanda II, Sultan dan rakyat Yogyakarta sangat setia kepada Republik Indonesia (RI). Pada 19 Desember 1949, Belanda mengambil Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Namun, semangat perjuangan masih ada. Para pejuang Republik Indonesia dan TNI terus melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan dukungan rahasia dari Sultan, yang memberikan logistik dan markas di Istana. Meskipun diplomasi dan kekuatan militer digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, serangan gerilya yang terus-menerus meresahkan Belanda tidak berhasil. Setelah mendapatkan informasi dari luar negeri tentang adanya Sidang Umum Dewan Keamanan PBB, sultan berusaha melakukan serangan psikologis untuk mendorong tentara untuk berjuang. Gagasan tersebut dibuktikan dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, yang diprakarsai oleh Sultan dan dilakukan oleh Letkol Soeharto.

Serangan itu merusak secara signifikan. Keyakinan anggota Komisi Tiga Negara (KTN) tentang kekuatan Republik Indonesia memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Respon PBB terhadap serangan tersebut memaksa gencatan senjata, pemulihan TNI, dan perundingan Roem Roijen untuk kembali ke Yogyakarta sebagai pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Sri Sultan untuk mengawasi kembalinya pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Untuk mencegah kekuasaan kosong, Sri Sultan mengeluarkan Proklamasi 30 Juni 1949. Ketika Indonesia menerima kemerdekaan dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 27 Desember 1949, kesetiaan Sri Sultan kepada Republik Indonesia mencapai puncaknya. Sebagai pewaris tahta Kerajaan Yogyakarta, Sri Sultan menunjukkan kesetiiaannya kepada Republik Indonesia. Kerajaan Mataram berniat untuk mengusir penjajah saat Sri Sultan HB IX menjabat. Dengan memperjuangkan dan memperkuat kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan menunjukkan pengabdian yang luar biasa kepada negara dan rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos Wacana Ilmu.
- Adams, C. (1984). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Gunung Agung.
- Agung, I. A. A. G. (1983). *Renville*. Sinar Harapan.
- Astuti, S. R. (2002). Peranan Sub Wehrkreise 105 pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di DIY : Suatu Kajian Sejarah Lisan. *Patra Widya*, 7(2).
- Carey, P. (1986). *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*. Gramedia.
- Chidmad, T., Sumiyati, S. E., & Hartono, B. (2001). *Pelurusan Sejarah Serangan 1 Maret 1949*. Media Pressindo.
- Darban, A. A. (1998). *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX*. Depdikbud.
- Heijboer, P. (1998). *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*. Grasindo.
- Kahin, G. M. (1995). *Nationalism and Revolution In Indonesia*. UNS Press dan Pustaka Harapan.
- Kutoyo, S. (1996). *Sri Sultan Hamengkubuwono IX : Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Mutiara Sumber Widya.
- Marsoedi, C. H. (1987). Peranan Militer dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI di DIY. *MSI Cabang Yogyakarta Dan BPSNT*.
- Mochtar, K. (1982). *Pak Sultan dari Masa ke Masa, dalam Atmakusumah (Peny), Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan HB IX*. PT. Gramedia.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad Ke-20 II*. Kanisius.
- Nasution, A. H. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 9*. Angkasa.
- Nasution, A. H. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. Disjarah dan Angkasa.
- Notosusanto, N. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Dephankam.
- Notosutardjo. (1956). *Konperensi Meja Bundar-KMB*. Penerbit Endang.
- Parrera, F. M. (1991). Ketokohan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Reformator Budaya dan Perintis Orde Baru. *Prisma*.
- Poespaningrat, P. (2008). *Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai*

*Mataram Baru. PB. Kedaulatan Rakyat.*

Pranoto, S. W. (2002). *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia 1946-1949*. Kanisius.

Pranoto, S. W. (2010). *Enam Jam di Yogyakarta 1 Maret 1949 Mitos atau Sejarah? DISJARAH AD*.

Ricklefs, M. C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Gajah Mada University Press.

SESKOAD. (1989). *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Citro Lamtoro Gung Persada.

Soetanto, H. (2006). *Yogyakarta Jendral Spoor Versus Jendral Sudirman*. Gramedia Pustaka.

Soewarno, P. J. (1994). *Hamengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1947*. Kanisius.

TIM LAI. (2000). *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1959*. Media Pressindo.

Tjkropanolo. (1992). *Jenderal Sudirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia*. Surya Persindo.

Tobing, K. M. L. (1986). *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : Renville*. Gunung Agung.

Widja, I. G. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Depdikbud.

Widodo. (1988). *Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 Terhadap Tegaknya Pemerintahan RI. Makalah Ceramah, 12 April 1988 Di BKSNT*.